

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Politik luar negeri dapat diartikan sebagai sebuah respon suatu negara sebagai upaya perlindungan serta pencapaian kepentingan nasionalnya, serta sebagai refleksi dari sebuah arah kebijakan dan perilaku politik suatu negara terhadap negara lain. Respon yang dikeluarkan oleh suatu negara bisa dalam berbagai macam bentuk, diantaranya dalam bentuk aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin atau ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non block, dan yang lainnya yang berhubungan dengan nasional yang berorientasikan terhadap politik luar negeri.

Selain itu dalam membentuk sebuah politik luar negeri, suatu negara akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum membentuk sebuah politik luar negeri. Faktor pembentuk politik luar negeri suatu negara diantaranya ada faktor kondisi politik dalam negeri suatu negara, lalu keadaan ekonomi, kekuatan militer suatu negara dan yang terakhir adalah faktor lingkungan internasional.

Begitu pula dengan ketujuh negara korban dari kebijakan Muslim Travel Ban seperti Iran, Irak, Suriah, Sudan, Yaman, Libya dan Somalia dimana pada dasarnya politik luar negeri negara mereka berfokuskan kepada keamanan nasional dan untuk pertumbuhan ekonomi negara mereka. Namun politik luar negeri tersebut berubah sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Dimana negara Iran dan Irak memilih untuk merespon dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump, sebagai arah refleksi dari

kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Dimana kedua negara tersebut mengeluarkan sebuah respon berupa sikap diplomatik dari negara mereka.

Iran sendiri memilih untuk tidak menerima visa para atlet pegulat dari Amerika Serikat yang akan melakukan pertandingan di negara Iran. Hal ini dilakukan oleh Iran sebagai respon dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Lalu Irak, dimana Irak sendiri melakukan tindakan dengan pengecekan ulang visa dan mempertimbangkan kembali keberadaan militer Amerika Serikat yang berada di Irak, dan juga akan mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan para pengusaha minyak Amerika Serikat yang menaruhkan bisnisnya di Irak.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut tentu saja dengan hasil pertimbangan dari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan suatu politik luar negeri, seperti keadaan militer mereka, kondisi politik dalam negeri mereka, keadaan ekonomi mereka serta kondisi lingkungan internasional masing-masing negara mereka. Dimana negara Iran dan Irak sendiri memiliki keadaan yang dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk merespon kebijakan Trump dengan sikap diplomatik yang dikeluarkan oleh Iran dan Irak.

Lalu lima negara lainnya, seperti Suriah, Somalia, Sudan, Yaman dan Libya dimana kelima negara ini hanya mengeluarkan beberapa statement penyayangan dan beberapa negara yang belum mengeluarkan respon apapun mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Hal tersebut dilakukan oleh lima negara ini dikarenakan kondisi negara mereka yang tidak memungkinkan untuk membentuk sebuah politik luar negeri sebagai upaya untuk merespon kebijakan yang

dikeluarkan oleh Trump. Dimana tidak akan memberikan dampak apapun bagi kelima negara ini apabila mereka mengeluarkan sebuah politik luar negeri sebagai respon dari kebijakan Trump. Apabila mereka merespon dan membalas kebijakan yang dikeluarkan Trump justru hanya akan memperburuk keadaan di negara mereka. Karena didapati data apabila rata-rata negara ini sedang dilanda konflik, baik perang saudara atau krisis ekonomi. Dibawah ini akan merangkum hasil temuan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.I Tabel Hasil Temuan Respon Berbagai Negara Korban

<b>Faktor Yang Mempengaruhi</b>				
<b>Negara</b>	<b>Respon</b>	<b>Politik Domestik</b>	<b>Ekonomi dan Militer</b>	<b>Lingkungan Internasional</b>
1. Iran	Membalas	Pemerintahan Hassan Rouhani memberikan harapan baru	Perekonomian, Rouhani berhasil mencabut sanksi ekonomi yang diterima Iran sebelumnya Militer, memiliki persenjataan yang ditakuti oleh negara lain	Mendapat dukungan dari organisasi internasional (ACLU, CAIR, Amnesty Internasional) dan negara-negara lain (Inggris, Prancis, Jerman Indonesia)
2. Iraq	Membalas	Pemerintahan yang tidak ter legitimate pasca runtuhnya Saddam Hussein	Perekonomian dan militer , Irak mendapat bantuan ekonomi dan militer dari AS pasca runtuhnya Saddam Hussein	
3. Suriah	Tidak Membalas	Krisis politik yang mengakibatkan perang sipil	Perekonomian, beberapa negara memutuskan hubungan dengan Suriah dibidang ekonomi akibat perang yang tidak kunjung usai Militer, memiliki keamanan	

			udara yang ketat	
4. Sudan	Menyayangkan	Pemisahan Sudan Selatan yang berdampak pada perang saudara	Perekonomian hancur akibat pemisahan Sudan Selatan dan sanksi komprehensif militer, sejak 2017 sedang gencar-gencarnya memperbaiki kemiliterannya	
5. Somalia	Tidak Membalas	Failed state	Perekonomian bergantung pada bantuan dari negara lain Militer, jumlah angkatan bersenjata tidak sebanding dengan jumlah penduduk	
6. Yaman	Tidak Membalas	Krisis kekuasaan pada masa kepemimpinan Abdullah Shaleh berdampak pada perang sipil	Perekonomian terpuruk akibat dari konflik berkepanjangan militer, jumlah personel militer yang tidak memadai	
7. Libya	Tidak Membalas	Runtuhnya rezim Gaddafi berdampak pada perang sipil antar etnis	Perekonomian hancur pasca peristiwa besar pada tahun 2011 Militer, tidak memiliki alat persenjataan yang memadai	